

## Hari ini Sidang Korupsi Pipa

*Satu kasus korupsi hasil kerja kepolisian ternyata sudah disidangkan. Bagaimana dengan yang ditangani kejaksaan. Puluhan kasus masih menjadi tunggakan tanpa kemajuan signifikan.*

NANGA PINOH. Meski proses hukum kasus korupsi pipanisasi air poring lama tak terendus publik, namun tak urung tetap disidangkan di Pengadilan Tipikor Pontianak. Tiga terdakwa hari ini, Kamis (15/12) kembali disidangkan.

"Kasus pipinisasi air poring telah masuk ke persidangan Tipikor. Esok (hari ini, red) ada agenda persidangan," kata Mochamad Jumali,

■ Halaman 7

## Hari ini

..... dari halaman 1

Kepala Kejaksaan Negeri Sintang dihubungi Equator, Rabu (14/12).

Ketiga terdakwa yang menjadi pesakitan itu adalah mantan Kepala Dinas PU Melawi, Luluk Edi Prayitno, Staf Dinas PU, Joko Waluyo dan Ketut, Direktur PT Batur Arta Mandiri (BAM).

Menurut Jumali, selama ini persidangan sudah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa. Sidang akan berlanjut Januari 2011 dengan alasan libur natal dan tahun baru. "Kemungkinan berlanjut pada Januari untuk persidangan kasus perkara itu," papar Jumali.

Jumali memaparkan persidangan bisa diikuti untuk informasi yang lebih detail. "Esok (hari ini, red) ke persidangan saja. Kasi intel Kajati Sintang, Joko mengikuti persidangan ini," ujarnya.

Sebelumnya, Kapolres Melawi, AKBP Yudi Hermawan mengungkapkan kasus korupsi pipanisasi sudah lama P-21 di Polres Melawi. Di awal 2011 telah berkas telah dilimpahkan.

Dalam kasus ini, berkasnya terpisah. Masing-masing Luluk Edi Prayitno, Joko Waluyo dan

Ketut. "Kasus ini sudah masuk ke persidangan. Sudah lama P-21. Mengenai informasi persidangan saya belum tahu persis. Yang pasti, kita telah melimpahkan berkas tersebut," paparnya, tadi malam.

Perkara ini berawal ketika PT BAM menangani proyek air bersih di Desa Poring, Kecamatan Nanga Pinoh senilai Rp 62 miliar. Mega proyek ini untuk membangun air gravitasi ke perumahan yang ada di ibu Kota Melawi, Nanga Pinoh dan sekitarnya. Proyek diawali dengan membangun bendungan, penampung air hingga pipanisasi.

Namun dalam pengerjaannya, tidak tuntas dan banyak diduga terjadi penyimpangan. Hingga dalam proses awal pengangkatan kasus ini, BPKP melakukan penilaian di lapangan. Didapat fakta pengerjaan proyek ini merugikan negara senilai Rp 7,2 miliar.

Akibat buruknya pengerjaan, hingga kini, warga Nanga Pinoh dan sekitarnya masih belum bisa memanfaatkan air poring secara maksimal. Pada musim kemarau, air tidak mengalir ke sebab penampung air dekat bendungan masih berupa

sangka saja. Hingga tidak bisa menampung air.

Pada musim hujan pun, air poring masih saja nyendat. Pasalnya, waktu hujan, sambungan pipa yang ada bergeser, hingga terjadi kebocoran. Akibatnya, air tidak bisa mengalir ke warga. Jelas ini menjadi bumerang bagi Perusahaan daerah Air Minum (PDAM) Melawi selalu pengelola air bersih bagi warga.

### Banyak Mandek

Penanganan perkara ini cukup mendapat apresiasi di tengah desakan penuntasan terhadap kasus lain yang ditangani kejaksaan dengan jumlah tunggakan perkara mencapai 62 perkara.

Kasus menonjol yang mengendap antara lain proyek pemberian obat cacing dan multi vitamin untuk 54 ribu siswa SD di Kabupaten Sanggau tahun 2006-2007. Namun dalam pelaksanaannya, diduga kuat terjadi penggelembungan harga atas jenis obat cacing Embacitrine Syrup dan multi vitamin Vicalcine Syrup. Total pengadaan untuk obat cacing adalah 219.030 botol dan vitamin 109.518 botol yang

kemudian diberikan kepada sekitar 54 ribu anak Sekolah Dasar dengan dosis masing-masing dua kali pemberian.

Dalam melakukan pengembangan kasus ini, penyidik Kejati Kalbar Kejaksaan sempat mengobok-obok kantor PT Rajawali Nusindo, Kamis, 21 Agustus 2008 silam. Penyidik mengumpulkan, bukti tambahan kasus di kantor pemenang lelang pengadaan obat cacing yang beralamat di Jalan Jendral Urip, Pontianak itu.

Anehnya, tak kunjung bergulir ke pengadilan meskipun Kejati kalbar telah menetapkan dua tersangka FPM dan FAT. Hasil perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalbar telah menyatakan, jumlah kerugian negara mencapai Rp 7 miliar lebih dengan rincian pada tahun anggaran 2006, kerugian daerah sebesar Rp 2,457,934,557 atau 78,38 persen dari total jumlah realisasi sebesar Rp 3,136,619,273. Sementara tahun anggaran 2007, kerugian daerah sebesar Rp 4,719,321,685 atau 86,04 persen dari total jumlah realisasi sebesar Rp 5,485,000,000. (aji/jul)